



DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

# PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024



Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang  
Kota Dumai

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan petunjuk- Nya, Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan lancar.

Tujuan yang diharapkan atas disusunnya Renja Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi dan strategi Pemerintah Kota Dumai dalam melakukan program kerja dan kegiatan pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai selama kurun waktu satu tahun (2024).

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 ini dirasa sangat diperlukan oleh Kota Dumai selaku unit kerja teknis yang selalu memerlukan berbagai informasi dan petunjuk guna pementapan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, kami menyadari masih terdapatnya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Anggaran 2024, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang baik guna perbaikan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai TA 2024 ini.

Akhirnya, harapan kami semoga Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini dapat diterima sebagai bentuk komitmen kami dalam mewujudkan misi dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Kami menyadari masih terdapatnya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang baik guna perbaikan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai TA 2024 ini.

Dumai, Agustus 2024  
Dinas Pertanahan Dan Penataan  
Ruang Kota Dumai  
  
MUHAMMAD MUFARIZAL, S.T.,M.IP.  
Pembina IV a  
NIP.19860216 201001 1 014

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TW II (TAHUN BERJALAN)</b> .....	8
2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Sampai Dengan TW II (Tahun Berjalan) .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai .....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai .....	22
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI</b> .....	25
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	30

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Berjalan (2024) Sampai Dengan TW II .....	9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Berjalan (2024) sampai TW II.....	21
Tabel 3 1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun Berjalan .....	26

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja (Rencana Kerja) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah di tingkat pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renja (Rencana Kerja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah yang harus disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Renja juga berisi tentang target, indikator kinerja, serta anggaran yang dibutuhkan. Renja berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan serta bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah daerah sejalan dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai berkaitan erat dengan dokumen lain seperti RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. RKPD menetapkan prioritas pembangunan tahunan yang menjadi acuan Renja, sedangkan Renstra memberikan kerangka jangka panjang bagi Renja. Keterkaitan juga terlihat dengan Renja K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renja provinsi/kabupaten/kota, di mana program dan kegiatan harus sejalan untuk mencapai sinergi. Tindak lanjut dari Renja adalah penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang mengalokasikan anggaran untuk program-program yang telah direncanakan dalam Renja.

Perubahan Rencana Kerja merupakan sebuah dokumen yang ditetapkan dikarenakan perlunya dilakukan perubahan seiring adanya faktor seperti perubahan APBD, kebijakan Pemerintah Pusat atau bencana alam, di mana dalam proses penyusunannya didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas yang merupakan tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 346 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa perumusan rancangan perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan hal tersebut, maka disusunlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dilaksanakan untuk mengakomodir kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini juga berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan ulang dari seluruh program kegiatan tahunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, sekaligus untuk memberikan informasi data secara makro bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, efisien, ramah, inovatif dan akuntabel serta memudahkan evaluasi kinerja.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan. Tahap Perumusan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, yang merupakan tahapan awal menyusun dokumen Perubahan Renja yang dilaksanakan setelah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai menerima surat edaran

Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja OPD khususnya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja terdiri dari:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai,
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rancangan Renja OPD disusun berdasarkan Landasan Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-117 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021- 2026;
  10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
  11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2021-2026;
  12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DinasPertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai;
  13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2021-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman dan acuan dalam perbaikan perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Pertanahan dan Penataan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Dumai
3. Menciptakan sinergitas antara prioritas dan sasaran pembangunan Dinas Pertanahan dan penataan Ruang Kota Dumai dengan Renstra Dinas Pertanahan dan penataan Ruang Kota Dumai, RKPD dan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018- 2023
4. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pertanahan dan penataan Ruang Kota Dumai dalam melaksanakan tugasnya agar tetap dapat terlaksana dan tidak mengurangi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen rancangan akhir Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, antara lain:

1. Sinkronisasi dan Optimalisasi pencapaian target kinerja RPJMD Tahun 2021-2026.
2. Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan berkesinambungan. bermanfaat, tepat sasaran.
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD Dinas Petanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, berupa latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan, agar pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG SAMPAI DENGAN TW II**

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai TW II tahun 2024, mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun-tahun sebelumnya. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

Pada bab ini MENJABAKAN tentang rincian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja. Bab ini juga menjelaskan sumber pendanaan dan jumlahnya serta menjelaskan peraturan Kepala Daerah yang menjadi dasar dilaksanakannya Perubahan Renja.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

### 3.3. Program dan Kegiatan

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut. Kaidah Pelaksanaan dokumen rancangan dan rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TW II (TAHUN BERJALAN)**

#### **2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Sampai Dengan TW II (Tahun Berjalan)**

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program strategis yang telah disusun pada tahun sebelumnya dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Evaluasi hasil pelaksanaan merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan penataan Ruang Kota Dumai pada tahun 2024 melaksanakan urusan pemerintahan yang dijabarkan dalam 9 Program, 19 kegiatan dan diimplementasikan dalam bentuk 86 Sub Kegiatan serta telah ditetapkan indikator kinerja program dan kegiatan (outcome) dan sub kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Berjalan (2024) Sampai Dengan TW II

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Program dan Kegiatan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun(n-1) (target awal 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai s/d tahun berjalan	
							Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	9	10-(5+7+9)	11-(10/4)
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG				
1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	2	2		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Dokumen	34.77%	34.77%
1	2	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	3 Dokumen	1 Dokumen	33%
1	2	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	2	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	-	0%
1	2	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	-	0%

1	2	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	<b>2 Dokumen</b>	50%
1	2	2	7	Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	1 Laporan	-	0%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	1 Dokumen	100%
1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	43 Orang/bulan	100%
1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	-	0%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	100%
1	2	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	2	3	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	1 Laporan	50%
1	2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1 Laporan	50%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai</b>	<b>100 Orang</b>		
1	2	5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0%
1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0%
1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0%
1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0	0%

1	2	6		<b>Kegiatan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai</b>	<b>100 Dokumen</b>		
1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	0%
1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7 Paket	116%
1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	0%
1	2	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	0	0%
1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	667 Laporan	175 Laporan	26,24%
1	2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	100%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 Unit</b>	<b>30 Unit</b>	<b>30%</b>
1	2	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0%
1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	0	0%
1	2	7	3	Pengadaan Alat Berat	Jumlah Unit Alat Berat yang Disediakan	2 Unit	0	0%
1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0	0%
1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	64 Unit	128%
1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0	0%

1	2	8		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	
1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0	0%
1	2	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	0%
1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%
1	2	9		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Unit</b>	<b>70 Unit</b>	<b>70%</b>
1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	0	0%
1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	8 Unit	40%
1	2	9	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Tersedianya Perawatan/Pemeliharaan Alat Berat	18 Unit	0	0%
1	2	9	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	-
1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	0	0%
1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	25%
2				<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Penduduk Berakses Air Minum</b>	<b>11.79%</b>	<b>13.73%</b>	
1	3	3	1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM</b>	<b>5320 SR</b>	<b>10000 SR</b>	<b>188%</b>
1	3	3	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	320 Unit	304 Unit	95%

3	2	1	23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	21 Lembaga	8 Lembaga	38.09%
3	2	1	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	100 Orang	100%
1	3	3	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	20%
3	2	1	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	13 Unit	9 Unit	69.23%
3	2	1	30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	2 Unit	200%
3	2	1	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5000 SR	3214 SR	64.28%
<b>3</b>				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25803 Unit</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4	2	1	10	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	100 Ton/hari	0	0%
4	2	1	13	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	100 Ton/hari	0	0%
4	2	1	15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	4 Dokumen	0	0%
4	2	1	17	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	0	0	0%
<b>4</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Layak Sanitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
				<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga Terlayani Akses Air Limbah Domestik Kota Dumai</b>	<b>188 Rumah Tangga</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

5	2	1	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	0	0%
5	2	1	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	500 Rumah Tangga	0	0%
5	2	1	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	0 Unit	0%
5	2	1	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100%
5	2	1	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	215 Rumah Tangga	18 Rumah Tangga	8.37%
5	2	1	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
5				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>5%</b>	<b>20%</b>	
3	8	2	1	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>10 Kegiatan</b>	<b>5 Kegiatan (masih dalam tahap pekerjaan)</b>	
8	2	1	18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	10 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung (masih dalam tahap pekerjaan)	50%
8	2	1	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	15 Dokumen	187%
8	2	1	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 Dokumen	120 Dokumen	80%

6				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase Penataan Bangunan dan lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>71,43%</b>	
3	9	2	1	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5 Lokasi</b>	<b>1 Lokasi</b>	<b>20%</b>
9	2	1	7	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
9	2	1	8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
9	2	1	9	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	0	0	0%
9	2	1	10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
7				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase Peningkatan penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>50.26%</b>		
3	12	2	1	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12	2	1	5	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0%
12	2	1	6	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0%
12	2	1	12	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	0	0%
3	12	2	2	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

12	2	2	5	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0%
12	2	2	7	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0%
								0%
<b>3</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12	2	3	5	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0	0	0%
12	2	3	6	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	7 Dokumen	0	0%
<b>3</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	
12	2	4	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>100%</b>
12	2	4	10	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
12	2	4	11	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
12	2	4	14	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	0	0	0%
12	2	4	15	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>				
<b>8</b>				<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>80%</b>		
<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	

4	2	1	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Dalam Satu Tahun Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	1	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita acara	1 Berita acara	100%
<b>9</b>				<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase Penatagunaan Tanah</b>	<b>80%</b>	<b>0.8</b>	
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	
10	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	3 Laporan	300%
10	2	1	2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
10	2	1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0%

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai pada tahun anggaran 2023 dilakukan pada 9 program, 19 kegiatan dan 86 sub kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 dibiayai oleh APBD Kota Dumai sebesar Rp. 203.213.347.980 (dua ratus tiga milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Realisasi dari kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 94,29%. Adapun penggunaan dana tersebut digunakan untuk belanja operasional dan belanja modal Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai**

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya
- c. Penyusunan dan sosialisasi dokumen rencana umum, rencana rinci, rencana aksi, rencana kawasan strategis pertanahan, tata ruang dan cipta karya
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pertanahan, tata ruang dan cipta karya
- e. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya
- f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya
- g. Pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi penataan ruang dan penataan daerah
- h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya
- i. Pengendalian serta koordinasi pertanahan, tata ruang dan cipta karya
- j. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
- k. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif
- l. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
- m. Pelaksanaan fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
- n. Penyusunan sistem informasi dan komunikasi pertanahan, tata ruang dan cipta karya
- o. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja pelayanan diharapkan dapat ditingkatkan agar menuju pelayanan yang prima dan cepat. Hal inilah yang menjadi target utama dalam segi pelayanan kedinasan. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja perangkat daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Berjalan (2024) sampai TW II

No.	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra	Realiasi / Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Sampai TW II Tahun Berjalan		Catatan Analisis
			Realisasi TW II (2024)	Proyeksi	
1	2	6	10	11	13
1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang				
	Tingkat Pelayanan insfrastruktur Dasar Bidang Sektor Cipta Karya	71,9	71,9	73,22	Telah Dilaksanakan
	Persentase Penduduk Berakses air minum	100	100	100	Telah Dilaksanakan
	Persentase Penduduk yang Berakses Sanitasi	100	100	100	Telah Dilaksanakan
	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang di selenggarakan	45,00	45,00	47,50	Telah Dilaksanakan
2	Terwujudnya Tata Ruang yang sesuai dengan pemanfaatan ruang				
	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	50,26	50,26	52,49	Telah Dilaksanakan
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya	50,26	50,26	52,94	Telah Dilaksanakan
3	Meningkatnya infrastruktur persampahan kota dumai				
	Persentase Infrastruktur Persampahan	42,59	42,59	45,37	Tidak Terlaksana
	Persentase terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota dumai	0	0	0	Tidak Terlaksana
4	Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Pertahun				
	Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan	60	60	80	Telah Dilaksanakan
	Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan pertahun	60	60	80	Telah Dilaksanakan

Sesuai dengan pencapaian IKU Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2023, dapat diketahui bahwa dalam dokumen perencanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Duma yang telah ditetapkan, ada 10 (sepuluh) IKU yang ditetapkan dan dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Diketahui bahwa ada 8 (Delapan) IKU yang telah memenuhi target dan 2 (dua) tidak memenuhi target. Adapun faktor tidak terpenuhinya target ke dua IKU adalah adanya rasionalisasi anggaran sehingga IKU tidak dapat dilaksanakan.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai**

Isu Strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan dari dalam daerah sendiri maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Berdasarkan telaahan terkait isu-isu strategis baik permasalahan telaahan isu dari nasional dan provinsi, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021-2025 adalah Peningkatan Pelayanan Air Bersih dan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing kota.

Penetapan isu strategis dimaksud berkenaan dengan permasalahan :

- a. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata dan berkeadilan
- b. Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur (jalan, drainase dan lain lain) daerah
- c. Produk tata ruang yang telah disusun belum mempunyai kekuatan hukum
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penyelenggaraan penataan ruang
- e. Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut akibat banyaknya perusahaan yang beraktifitas di pesisir pantai serta tingginya abrasi pantai
- f. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang, kualitas lingkungan dan pengelolaan sampah secara mandiri.

Berdasarkan isu strategis diatas perlu dapat disimpulkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Infrastruktur Air bersih merupakan misi utama Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang dan memiliki kegiatan yaitu Pembangunan Infrastruktur Air Bersih, dan Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum
- b. Perlu adanya Bimbingan Teknis dan Pelatihan untuk SDM Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- c. Perlu adanya sosialisasi tentang penyelenggaraan penataan ruang terhadap masyarakat dengan Program Pemanfaatan Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, ada beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat yang dialami Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai yaitu :

#### **A. Faktor Penghambat**

1. Kendala Waktu dalam memulai program dan kegiatan untuk mencapai target, yang di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
  - Keterlambatan penerimaan dokumen pelaksanaan anggaran
  - Perencanaan dan pelaksanaan fisik dilaksanakan pada tahun yang sama.
2. Kendala Biaya untuk mencapai target pada program dan kegiatan yang membutuhkan pembiayaan yang signifikan, sedangkan pada saat ini APBD Kota Dumai terbatas.
3. Kendala Material untuk pelaksanaan konstruksi di mana materialnya didatangkan dari luar daerah sehingga di saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan konstruksi, sering kekurangan material.
4. Kendala Sumber Daya Manusia. Penyedia jasa tidak sepenuhnya menguasai dan mengerti aspek teknis spesifikasi tidak memiliki manajerial yang baik.

5. Kendala Perencanaan. Perencanaan sistem Penataan laksana yang tidak terinci menyebabkan ketidaksempurnaan pelaksanaan.

## **B. Faktor Pendorong**

1. Bantuan pendanaan yang bersumber dari dana APBD dan APBD Provinsi Riau
2. Pelaksanaan KPBU dalam mencapai target/IKU
3. Adanya regulasi yang dapat mempercepat proses pelaksanaan pembangunan.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau harus menghadapi beberapa tantangan terkait pengembangan pelayanan. Namun, ada beberapa peluang yang dimiliki Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Untuk itu, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### **A. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat dikelompokkan sebagai berikut:**

1. Tantangan berkaitan dengan penyediaan air minum yang aman terdiri dari laju pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi.
2. Pertumbuhan cakupan pelayanan air minum tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk.
3. Tingginya angka prevalensi penyakit akibat buruknya layanan air minum dan sanitasi.
4. Tingginya pencemaran lingkungan perkotaan.
5. Terbatasnya sumber air baku untuk penyediaan air minum di wilayah kabupaten/kota.
6. Air, peduli sekarang atau merugi nanti.

### **B. Sedangkan, peluang yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dikelompokkan sebagai berikut**

1. Adanya sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD Provinsi (APBN) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan
2. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi APBD

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan rangkaian penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya serta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang bersumber dari alokasi dana dari APBD Kota Dumai, APBD Provinsi Riau dan APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam periode lima tahunan dan tahunan yang dirinci menurut kewenangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kota Dumai, mitra yang terlibat serta koordinator dan penanggungjawab juga kewilayahan dengan bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya yang terlibat.

Kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai disesuaikan dengan bidang-bidang dalam organisasi dan tata kerja yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Dumai Tahun 2021–2026.

Berdasarkan penyesuaian/pemetaan program kegiatan berbasis kinerja yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Terdapat dari 9 (sembilan) program, 19 kegiatan dan 86 sub kegiatan. Hasil perincian program/kegiatan/sub kegiatan serta jumlah anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3 1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan

No.	Program Kegiatan		Target Capaian		Pagu Indikatif		Selisih
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	7
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>36,134,095,569</b>	<b>9,753,759,324</b>	<b>26,380,336,245</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>13 Dokumen</b>	<b>13 Dokumen</b>	<b>188,497,500</b>	<b>88,077,100</b>	<b>100,420,400</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	35,486,400	14,513,600
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	17,699,500	5,886,800	11,812,700
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	17,699,500	8,868,600	8,830,900
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1,769,950	5,735,100	-3,965,150
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	17,699,500	8,482,600	9,216,900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	17,699,500	13,803,700	3,895,800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	9,813,900	40,186,100
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>13,237,171,309</b>	<b>6,403,041,580</b>	<b>6,834,129,729</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	13,217,171,309	6,394,556,480	6,822,614,829
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	8,485,100	11,514,900
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>82,162,500</b>	<b>23,356,500</b>	<b>58,806,000</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	22,162,500	7,390,300	14,772,200
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2 Laporan	30,000,000	7,980,000	22,020,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	30,000,000	7,986,200	22,013,800
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Orang</b>	<b>100 Orang</b>	<b>500,000,000</b>	<b>-</b>	<b>500,000,000</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	500,000,000	-	500,000,000
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1,959,213,460</b>	<b>1,000,152,488</b>	<b>959,060,972</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	30,915,000	-	30,915,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Paket	7 Paket	400,000,000	203,582,948	196,417,052
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket	61,372,800	25,646,040	35,726,760
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	200,000,000	44,537,500	155,462,500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 Dokumen	20 Dokumen	30,000,000	9,940,000	20,060,000
	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	3 Paket	3 Paket	76,603,660	-	76,603,660
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	1,090,322,000	701,946,000	388,376,000

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	14,500,000	55,500,000
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30 Unit</b>	<b>30 Unit</b>	<b>13,425,208,000</b>	<b>1,039,337,560</b>	<b>12,385,870,440</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	125,208,000	-	125,208,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	1,000,000,000	-	1,000,000,000
	Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	2 Unit	2 Unit	10,000,000,000	-	10,000,000,000
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	2 Unit	2 Unit	100,000,000	470,308,900	-370,308,900
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	13 Unit	2,000,000,000	569,028,660	1,430,971,340
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	200,000,000	-	200,000,000
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>4,018,212,800</b>	<b>775,600,300</b>	<b>3,242,612,500</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	1,000,000,000	-	1,000,000,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	-	50,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	2,968,212,800	775,600,300	2,192,612,500
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>70 Unit</b>	<b>70 Unit</b>	<b>2,723,630,000</b>	<b>424,193,796</b>	<b>2,299,436,204</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	41,230,000	-	41,230,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Unit	29 Unit	682,400,000	221,723,760	460,676,240
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	18 Unit	18 Unit	1,500,000,000	-	1,500,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2 Unit		202,470,036	-202,470,036
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80 Unit	80 Unit	500,000,000	-	500,000,000
							0
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>37,38 %</b>	<b>37,38 %</b>	<b>11,555,000,000</b>	<b>41,931,295,447</b>	<b>-30,376,295,447</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5320 SR</b>	<b>5320 SR</b>	<b>11,555,000,000</b>	<b>41,931,295,447</b>	<b>-30,376,295,447</b>
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	320 Unit	320 Unit	1,605,000,000	1,279,960,000	325,040,000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	794,253,235	-294,253,235
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Pedesaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2 Unit	2 Unit	850,000,000	2,755,322,034	-1,905,322,034
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8000 SR	8000 SR	8,600,000,000	37,101,760,178	-28,501,760,178
							0
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,400,000,000</b>
	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0 Unit</b>	<b>0 Unit</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,400,000,000</b>

	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	200,000,000	-	200,000,000
	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0 Ton/hari	0 Ton/hari	1,000,000,000	-	1,000,000,000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	0 Dokumen	0 Dokumen	200,000,000	-	200,000,000
							0
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>1,955,048,000</b>	<b>144,952,000</b>
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>188 Rumah Tangga</b>	<b>188 Rumah Tangga</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>1,955,048,000</b>	<b>144,952,000</b>
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1000 Rumah Tangga	1000 Rumah Tangga	500,000,000	308,575,600	191,424,400
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	1 Unit	500,000,000	659,660,000	-159,660,000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 Unit	2 Unit	500,000,000	314,109,400	185,890,600
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	100,000,000	450,080,000	-350,080,000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	222,623,000	277,377,000
5	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>20 %</b>	<b>20 %</b>	<b>38,668,809,079</b>	<b>112,704,319,220</b>	<b>-74,035,510,141</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>10 Kegiatan</b>	<b>10 Kegiatan</b>	<b>38,668,809,079</b>	<b>112,704,319,220</b>	<b>-74,035,510,141</b>
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	6,299,514,729	19,820,324,503	-13,520,809,774
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	31,369,294,350	92,474,794,717	-61,105,500,367
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000,000	409,200,000	590,800,000
6	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>71,43 %</b>	<b>71,43 %</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	<b>900,000,000</b>
	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5 Lokasi</b>	<b>5 Lokasi</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	<b>900,000,000</b>
	Penyusunan Rencana dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1 Kawasan	500,000,000	-	500,000,000

	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	800,000,000	400,000,000	400,000,000
7	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>62,49 %</b>	<b>62,49 %</b>	<b>4,579,721,748</b>	<b>2,461,191,200</b>	<b>2,118,530,548</b>
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>601,180,700</b>	<b>845,090,100</b>	<b>-243,909,400</b>
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	500,000,000	-250,000,000
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	244,071,200	5,928,800
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	2 Orang	2 Orang	101,180,700	101,018,900	161,800
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>2,878,541,048</b>	<b>800,000,000</b>	<b>2,078,541,048</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2,878,541,048	800,000,000	2,078,541,048
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>200,000,000</b>	<b>253,268,400</b>	<b>-53,268,400</b>
	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	253,268,400	-53,268,400
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>900,000,000</b>	<b>562,832,700</b>	<b>337,167,300</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	600,000,000	384,983,100	215,016,900
	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	-	75,000,000
	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	100,018,500	-25,018,500
	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	1 Berita Acara	150,000,000	77,831,100	72,168,900
							0
8	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>	<b>-</b>	<b>241,000,000</b>	<b>-241,000,000</b>
	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>-</b>	<b>241,000,000</b>	<b>-241,000,000</b>
	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100,000,000	-100,000,000
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	-	141,000,000	-141,000,000
							0
9	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>	<b>-</b>	<b>400,000,000</b>	<b>-400,000,000</b>
	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>-</b>	<b>400,000,000</b>	<b>-400,000,000</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	3 Laporan	3 Laporan	-	400,000,000	-400,000,000

## BAB V

### PENUTUP

Secara umum Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2024 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang menguraikan secara detail target sasaran yang hendak dicapai selama tahun 2024. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada tahun 2024 pada Triwulan II, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.169,846,613,191 (seratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah). Anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dipergunakan untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 dan merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Kerangka kinerja dan anggaran melalui program-program diusulkan berdasarkan pada arah kebijakan nasional maupun daerah dengan berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Dumai, sasaran dan arah kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang diimplemetasikan atau dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan harapan semoga program dan kegiatan yang direncanakan mendapat porsi pendanaan yang memadai, sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan maksimal.

Dumai, Agustus 2024  
Dinas Pertanahan Dan Penataan  
Ruang Kota Dumai



MUHAMMAD MUFARIZAL, S.T.,M.IP.  
Pembina IV a  
NIP.19860216 201001 1 014